ANALISIS YURIDIS ATAS PELAKSANAAN BENTUK KERJASAMA 'SINERGI' ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH: STUDI KASUS PELAKSANAAN SINERGI PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Intan Dara Lestari[1], Muhammad Zaki Mubarrak[2]

INTISARI

Penyelenggaraan pemerintahan, jika di lihat dari kondisi geografis negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari banyaknya pulau dengan jumlah penduduk yang beragam suku, etnik, bahasa, dan budaya yang multikultural, dimana menggunakan sistem pemerintahan yang cocok adalah demokratis, dan pelaksanaannya tidak mungkin hanya di tangani oleh satu pemerintahan saja, dalam hal ini pemerintah daerah ikut serta dalam penyelenggaraan yang terbagi kewenangannya dalam bentuk otonomi daerah dan di laksanakan oleh lembaga lembaga pemerintahan, dengan mengupayakan kebijakan dan mekanisme terkait dengan kerja sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kategori lembaga pemerintah dalam melaksanakan bentuk kerja sama, dan penerapan dari bentuk kerjasama sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris yang berorientasi pada data sekunder dan data primer yang menghasilkan ada sembilan (9) kategori lembaga pemerintah pusat yang menjalankan penyelenggaraan pemerintah pusat, salah satunya sebagai kerja sama sinergi yang merupakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan fokus pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah yang berdasarkan dengan Permendagri 2020 tentang Kerja Sama Daerah melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah melalui Dokumen Kerja Sama, atau *Momerandum of Understanding (MoU).*

Kata Kunci: Sinergi, Kerja Sama Daerah, *Momerandum of Understanding (MoU)*

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

[1] Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
[2] Dosen Program Studi Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE 'SYNERGY' FORM OF COOPERATION BETWEEN THE CENTRAL GOVERNMENT AND LOCAL GOVERNMENTS: A CASE STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF SYNERGIES IN THE LOCAL GOVERNMENT OF THE CITY OF YOGYAKARTA

Intan Dara Lestari[1], Muhammad Zaki Mubarrak[2]

ABSTRACT

The implementation of government, when viewed from the geographical conditions of the unitary state of the Republic of Indonesia, which consists of many islands with a population of diverse ethnicities, ethnicities, languages, and multicultural cultures, where using a suitable government system is democratic, and its implementation cannot be handled by only one government, in this case the local government participates in the implementation of divided authority in the form of regional autonomy and is carried out by government agencies, by pursuing policies and mechanisms related to cooperation. This study aims to determine and analyze the categories of government agencies in carrying out forms of cooperation, and the application of synergistic forms of cooperation between the central government and local governments in Yogyakarta City. This research uses normative and empirical legal research oriented to secondary data and primary data which results in nine (9) categories of central government agencies that carry out the implementation of the central government, one of which is synergy cooperation which is development planning and implementation with a focus on sharing roles and responsibilities between the central and regional governments based on Permendagri 2020 concerning Regional Cooperation through Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government through Cooperation Documents, or *Momerandum of Understanding (MoU).*

Keywords: Synergy, Regional Cooperation, *Momerandum of Understanding (MoU)*

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

[1] Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
[2] Dosen Program Studi Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.